

DAFTAR PUSTAKA

- Kunja, E. R. 2019. Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan USAHA Milik Desa (BUMDes) di Desa Fafinesu C Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. *JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 1(1), 26-40.
- Ibrahim, I., & Sutarna, I. T. 2018. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan Kawasan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sumbawa Barat. *Tataloka. Jurnal Tata Loka*, 20(3), 309-316.
- Anggraeni, M. R. R. S. 2017. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. 2019. Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2), 39-47.
- Tarlani, T. 2020. Menilai Dampak BUMDES Bersama Danar terhadap Masyarakat di Kecamatan Leles Kabupaten Garut. *ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(2), 276-284.
- Trisnawati, A. P., & Indrajaya, G. B. 2014. Peran BUMDes Bagi Petani Miskin di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(6), 1097-1126.

Pariyanti, E. 2019. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *FIDUSIA: JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN*, 2(2).

Syukran, A. 2016. DAMPAK KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) BAGI MASYARAKAT DESA BARENG KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO. *Publika*, 4(4).

Gayo, S. B., Erlina, E., & Rujiman, R. 2020. Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarkat Perdesaan. *Media Komunikasi Geografi*, 21(2), 202-209.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.